

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK UNTUK MENLAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2018)

David Al Farizky

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alfarizkydavid10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015-2018 dilihat dari: (1) Analisis Laporan Realisasi Anggaran, (2) Analisis Rasio Laporan Keuangan, (3) Analisis Arus Kas.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak, pertumbuhan aset, rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan arus kas bebas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya dilihat dari: (1) rasio pertumbuhan pendapatan dapat dikategorikan baik karena rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,03% (2) rasio pertumbuhan belanja dapat dikategorikan baik karena rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,72% (3) derajat desentralisasi dapat dikategorikan baik karena rata-rata pertumbuhannya sebesar 38,10% (4) rasio ketergantungan daerah dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 24,15% (5) rasio kemandirian daerah dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 157,73% (6) rasio efektivitas PAD dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 106,69% (7) rasio efektivitas pajak dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 104,71% (8) pertumbuhan aset dikategorikan kurang baik karena pertumbuhannya hanya sebesar 4,46% (9) rasio lancar dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 446,00% (10) rasio kas dikategorikan baik karena pertumbuhannya

sebesar 241,25% (11) rasio cepat dikategorikan baik karena pertumbuhannya sebesar 417,75% (12) rasio likuiditas di kategorikan baik karena dari ketiga rasio poin 9,10,11 pertumbuhannya sangat tinggi (13) rasio solvabilitas dikategorikan baik karena pertumbuhan rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap modal sangat kecil, sebesar 1,23% (14) analisis arus kas dikategorikan kurang baik karena penurunan arus kas bebas karena belanja modal yang besar.

Dari hasil analisis yang dilakukan, saran peneliti penyerapan anggaran belanja yang maksimal setiap tahun dengan di laksanakan program dan kegiatan secara efektif, pengelolaan dan pendayagunaan aset yang baik dan efektif, pemerintah daerah lebih baik berorientasi untuk infrastruktur publik daerah dalam rangka perbaikan pelayanan publik, menarik investor, dan menggerakkan perekonomian daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Belanja, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak, Pertumbuhan Aset, Rasio Lancar, Rasio Kas, Rasio Cepat, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Arus Kas Bebas.

ABSTRACT

This study aims to determine the Regional Financial Performance of Surabaya City Government in 2015-2018 seen from: (1) Analysis of Budget Realization Reports, (2) Financial Statement Ratio Analysis, (3) Cash Flow Analysis.

This research is quantitative descriptive. The study was conducted at the Surabaya Regional Financial and Tax Management Agency (BPKPD). Data collection uses the documentation method. The data analysis technique used is descriptive quantitative with the formula: income growth ratio, expenditure growth ratio, degree of decentralization, regional dependency ratio, regional independence ratio, PAD effectivity ratio, tax effectiveness ratio, asset growth, current ratio, cash ratio, fast ratio, ratio liquidity, solvency ratio, and free cash flow.

The analysis shows that the financial performance of the Surabaya City Government can be seen from: (1) the ratio of income growth can be categorized as good because the average growth of 5.03% (2) the ratio of expenditure growth can be categorized as good because the average growth of 13.72% (3) the degree of decentralization can be categorized as good because the average growth of 38.10% (4) the ratio of regional dependency is categorized as good because the growth of 24.15% (5) the ratio of regional independence is categorized good because the growth is 157.73% (6) PAD effectiveness ratio is categorized good because its growth is 106.69% (7) tax effectiveness ratio is categorized good because its growth is 104.71% (8) asset growth is categorized as poor because growth is only 4.46% (9) current ratio is categorized good because the growth is 446.00% (10) the cash ratio is categorized good because the growth is 241.25% (11) the fast ratio is categorized good because the growth of 417.75% (12) the liquidity ratio is categorized good because of the three point ratios 9,10,11 the growth is very high (13) the solvency ratio is categorized good because the growth of debt to equity ratio and debt to capital ratio is very small, equal to 1.23% (14) cash flow analysis is categorized unfavorable due to the decrease in free cash flow due to large capital expenditure.

From the results of the analysis conducted, the researchers suggest that the maximum budget absorption every year by implementing programs and activities effectively, managing and

utilizing good and effective assets, local governments are better oriented to local public infrastructure in order to improve public services, attract investors , and drive the regional economy.

Keywords: Regional Financial Performance, Revenue Growth Ratio, Expenditure Growth Ratio, Decentralization Degree, Regional Dependency Ratio, Regional Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Tax Effectiveness Ratio, Asset Growth, Current Ratio, Cash Ratio, Fast Ratio, Liquidity Ratio, Regional Ratio Solvency, and Free Cash Flow.

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) baru dimiliki tahun 2005, sejak dikeluarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian , pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum dan Syafitri : 2012).

Salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat, adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembudayaan akuntansi dan akuntabilitas tersebut juga akan berimplikasi pada perlunya budaya audit, karena tanpa audit yang memadai maka akan sangat sulit terwujud akuntabilitas yang nyata.

Oleh karena itu, tiga kunci yaitu budaya akuntansi, budaya akuntabilitas dan budaya audit agar ditanamkan dalam diri setiap pihak yang terkait dalam tata kelola pemerintahan agar terwujud *good governance* yang di cita-citakan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim dan Kusufi : 2012).

LANDASAN TEORI

Kinerja

Kinerja adalah keluaran atau hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah masing-masing unsur laporan keuangan, menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut agar memperoleh pengertian, pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan.

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$Rumus = \frac{\text{Pendapatan Th (t)} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$Rumus = \frac{\text{Realisasi Belanja Th (t)} - \text{Raealisasi Belanja Th (t-1)}}{\text{Realisasi Belanja Th (t-1)}} \times 100\%$$

3. Analisis Derajat Desentralisasi

$$Rumus = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Analisis Rasio Ketergantungan Daerah

$$Rumus = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

$$Rumus = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sementara rumus untuk rasio efisiensi pajak daerah

$$Rumus = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

6. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$Rumus = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

7. Analisis Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD

$$Rumus = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Sementara untuk analisis rasio efisiensi PAD

$$Rumus = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

8. Derajat Kontribusi BUMD

$$Rumus = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

9. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$Rumus = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

10. Analisis Varian Belanja

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran.

11. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$pertumbuhan = \frac{\text{Realisasi belanja th (t)} - \text{realisasi belanja th (t-1)}}{\text{realisasi belanja th (t-1)}} \times 100\%$$

12. Analisis Belanja per fungsi terhadap total belanja

$$Rasio Belanja per Fungsi = \frac{\text{Realisasi belanja fungsi ...}}{\text{Total belanja daerah}}$$

13. Analisis Belanja Operasi terhadap total belanja

$$Rumus = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

14. Analisis Belanja modal terhadap total belanja

$$Rumus = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

15. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Belanja langsung biasanya lebih besar dari belanja tidak langsung,

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} =$$

16. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

17. Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total PDRB}}$$

18. Analisis Aset, terdiri dari:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Pendapatan Th (t)} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

19. Analisis Modal Kerja (*Working Capital*)

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

20. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

21. Rasio Kas

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek(Investasi Jangka Pendek)}}{\text{Utang Lancar}}$$

22. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

23. *Working Capital to Total Asset Ratio*

$$WC \text{ to Total Aset} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Total Aset}}$$

24. Rasio Solvabilitas

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

25. Rasio Utang terhadap Ekuitas

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}} \times 100\%$$

26. Rasio Utang terhadap Aset Modal

$$\text{Rasio Utang Terhadap aset modal} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

27. Analisis pertumbuhan utang (*Growth of Public Debt*)

Analisis Pertumbuhan Utang =

$$\frac{\text{Tiap Pos Utang Th (t)} - \text{Tiap Pos Utang Th (t-1)}}{\text{Tiap Pos Utang Th (t-1)}} \times 100\%$$

28. Analisis Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Bunga Utang} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bunga Utang Jangka Panjang}}$$

29. Analisis Rasio Utang terhadap Pendapatan Pajak Daerah

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Pendapatan Pajak Daerah}}$$

30. Analisis Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

31. Analisis Rasio Utang terhadap Total Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

32. Analisis pertumbuhan arus kas

$$\begin{aligned} \text{Analisis Pertumbuhan Arus Kas} = \\ \frac{\text{Arus kas Th (t)} - \text{Arus Kas Th (t-1)}}{\text{Arus Kas Th (t-1)}} \times 100\% \end{aligned}$$

33. Analisis arus kas dari aktivitas operasi (KDO)

$$\text{Analisis Pertumbuhan Arus Kas} = \frac{\text{KDO Th (t)} - \text{KDO Th (t-1)}}{\text{KDO Th (t-1)}} \times 100\%$$

34. Analisis Arus Kas dari Aktivitas Investasi

$$\begin{aligned} \text{Analisis Pertumbuhan Arus Kas} = \\ \frac{\text{KDI Th (t)} - \text{KDI Th (t-1)}}{\text{KDI Th (t-1)}} \times 100\% \end{aligned}$$

35. Analisis Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

$$\begin{aligned} \text{Analisis Pertumbuhan Arus Kas} = \\ \frac{\text{KDP Th (t)} - \text{KDP Th (t-1)}}{\text{KDP Th (t-1)}} \times 100\% \end{aligned}$$

36. Analisis Arus Kas Bebas

$$\text{Arus Kas Bebas} = \text{Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi} - \text{Belanja Modal}$$

PEMBAHASAN

Analisis Anggaran

No	Rasio	Tahun				Rata-Rata
		2018	2017	2016	2015	
1	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	2,51%	13,36%	0,31%	5,03%	5,30%
2	Rasio Pertumbuhan Belanja	3,23%	10,64%	10,19%	13,72%	9,45%
3	Derajat Desentralisasi	40,28%	42,86%	38,49%	38,10%	39,93%
4	Rasio Ketergantungan Daerah	24,07%	23,43%	25,70%	24,15%	24,34%
5	Rasio Kemandirian Daerah	167,34%	182,93%	149,79%	157,73%	164,45%
6	Rasio Efektivitas PAD	104,50%	109,60%	103,69%	106,69%	106,12%
7	Rasio Efektivitas Pajak	104,63%	113,54%	106,17%	104,71%	107,26%
8	Derajat Kontribusi BUMD	2,82%	2,61%	3,22%	3,35%	3,00%
9	Rasio Belanja Rutin	27,94%	27,03%	30,16%	27,54%	28,17%
10	Rasio Belanja Pembangunan	11,85%	12,62%	10,07%	10,45%	11,25%
11	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	29,75%	31,82%	25,02%	27,50%	28,52%

Sumber BPKPD diolah peneliti

Dari hasil perhitungan diatas. Untuk pertumbuhan pendapatan Kota Surabaya terus mengalami keniakan dari tahun 2015-2018, persentase paling tinggi terjadi di tahun 2016-2017 dan paling rendah terjadi di tahun 2015-2016.

Rasio pertumbuhan belanja menurun dari tahun 2015-2018, yang paling signifikan terjadi pada tahun 2017-2018. Ini mengindikasikan bahwa belanja Kota Surabaya semakin efektif dan efisien.

Rasio derajat desentralisasi mengalami pertumbuhan dari tahun 2015-2018 di tingkat 40% yang bisa diartikan bahwa jumlah PAD Kota Surabaya cukup besar dalam jumlah total pendapatan daerah.

Rasio ketergantungan daerah persentasenya dari tahun 2015-2018 tidak lebih dari 26% yang artinya total pendapatan daerah Kota Surabaya tidak tergantung pada pendapatan transfer pemerintah lain.

Persentase Rasio kemandirian daerah dari tahun 2015-2018 juga sangat tinggi mencapai >100% yang artinya sangat baik atau ketergantungan daerah Kota Surabaya terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat dan provinsi sangat rendah.

Rasio efektivitas PAD persentasenya juga sangat tinggi dari tahun 2015-2018 mencapai >100% ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun dibanding dengan PAD yang dianggarkan.

Rasio efektivitas pajak persentasenya meningkat dari tahun 2015-2018 mencapai >100% ini mengindikasikan bahwa realisasi setiap pos pajak yang ada mengalami peningkatan signifikan setiap tahun dari yang dianggarkan.

Derajat kontribusi BUMD dari tahun 2015-2018 persentasenya sangat kecil, dimana mengindikasikan bahwa kontribusi BUMD sangat rendah untuk PAD Kota Surabaya.

Analisis Laporan Keuangan

No	Rasio	Tahun				Rata-Rata
		2018	2017	2016	2015	
1	Pertumbuhan Aset	5,28%	8,81%	3,16%	4,93%	4,46%
2	Rasio Lancar	3,96	3,46	4,66	5,76	446,00%
3	Rasio Kas	1,93	1,82	2,53	3,37	241,25%
4	Rasio Cepat	3,63	3,2	4,38	5,5	417,75%
5	<i>Working Capital to Total Asset Ratio</i>	3,50%	3,26%	3,43%	4,36%	3,64%
6	Rasio Solvabilitas	84,69	74,24	104,26	109,21	9310,00%
7	Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1,35%	1,52%	1,07%	0,99%	1,23%
8	Rasio Utang Terhadap Modal	1,32%	1,50%	1,06%	1,02%	1,23%
9	Analisis Rasio Bunga Utang terhadap PAD					
10	Analisis Rasio Utang terhadap Pajak Daerah	0,14	0,15	0,12	0,11	13,00%
11	Analisis Rasio Utang terhadap PAD	0,11	0,12	0,1	0,09	10,50%

Sumber BPKPD diolah peneliti

Pertumbuhan aset Kota Surabaya mengalami kenaikan dari tahun 2015-2018 namun tidak signifikan, tetapi tetap bisa dikatakan baik.

Rasio lancar juga sangat kecil yang mengindikasikan utang lancar dari tahun 2015-2018 tidak lebih besar dari aktiva lancar Kota Surabaya.

Rasio kas persentasenya kecil yang mengindikasikan bahwa kas Kota Surabaya lebih besar dari utang lancar dari tahun 2015-2018.

Rasio cepat hasilnya mengindikasikan bahwa kinerja kecepatan pembayaran utang lancar pemerintah Kota Surabaya sangat baik.

Hasil perhitungan rasio solvabilitas nilainya tinggi yang mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas keuangan Kota Surabaya sangat baik. Ini juga dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap modal yang rendah.

Analisis Pertumbuhan Arus Kas

No	Rasio	Tahun				Rata-Rata
		2018	2017	2016	2015	
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-7,95%	79,16%	-23,58%	14,16%	12,36%
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-3,94%	39,12%	0,08%	28,96%	12,84%
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan					
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	-124,14%	-154,10%	363,12%	-290,46%	-41,12%

Sumber BPKPD diolah oleh peneliti

Pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami fluktuasi naik turun dari tahun 2015-2018, untuk tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan hingga hasilnya minus karena jumlah arus keluar kas lebih besar dibanding jumlah arus masuk kas.

Pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi cenderung mengalami kenaikan yang signifikan, ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota melakukan investasi dengan melakukan pembangunan-pembangunan.

Analisis Arus Kas Besar

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Naik/Turun
Kas dari Operasi	1.912.249.251.095,97	1.461.352.650.884,05	-450.896.600.211,92
Belanja Modal	-1.808.965.985.318,00	-1.807.494.337.487,00	-1.471.647.831,00
Arus Kas Bebas	3.721.215.236.413,97	3.268.846.988.371,05	-452.368.248.042,92
Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Naik/Turun
Kas dari Operasi	2.618.220.764.407,99	2.409.817.094.232,93	-208.403.670.175,06
Belanja Modal	-2.514.499.258.743,41	-2.415.421.040.762,45	-99.078.217.980,96
Arus Kas Bebas	5.132.720.023.151,40	4.825.238.134.995,38	-307.481.888.156,02

Sumber BPKPD diolah oleh peneliti

Arus kas bebas tahun 2016-2017 mengalami kenaikan dari Rp. 3.268.846.988.371 di tahun 2016 menjadi Rp. 5.132.720.023.151 pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan kas dari operasi mengalami peningkatan dari Rp. 1.461.352.650.884 di tahun 2016 menjadi Rp. 2.618.220.764.407 pada tahun 2017.

Arus kas bebas tahun 2017-2018 mengalami penurunan kembali dari Rp. 5.132.720.023.151 di tahun 2017 menjadi Rp. 4.825.238.134.995 pada tahun 2018. Penurunan ini disebabkan menurunnya kas dari operasi dari Rp. 2.618.220.764.407 di tahun 2017 menjadi Rp. 2.409.817.094.232 pada tahun 2018.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis anggaran dan analisis laporan keuangan yang telah dilakukan, menunjukkan kecenderungan fluktuasi naik turun di beberapa pos analisis rasio. Namun penurunan tidak sampai dibawah batas persentase rendah di tiap analisis rasio yang sesuai dengan teori yang digunakan. Sehingga kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya dikatakan sangat baik.

Dari analisis Arus Kas dapat disimpulkan bahwa kenaikan yang terjadi pada arus kas bersih dari aktivitas investasi, dikarenakan pemerintah kota melakukan pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur daerah. Hal ini berdampak pada arus kas bebas yang mengalami fluktuasi naik turun.

SARAN

Kontribusi dari BUMD terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Surabaya belum optimal. Seharusnya Pemerintah Kota menekankan pada tiap-tiap BUMD agar mempercepat peningkatan pendapatan, serta mengoptimalkan potensi aset.

Pemerintah daerah tidak boleh berorientasi untuk terus memperbesar belanja modal dengan membuat gedung baru. Lebih baik untuk infrastruktur publik daerah dalam rangka perbaikan pelayanan publik, menarik investor, dan menggerakkan perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Zuhri, Muhammad Ahmad Soleh. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. 187-195

Suranta, Sri, Bandi. Halim Dedy. Syafiqurrahman. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi komparasi propinsi jawa tengah dakalimantan selatan). 05(2), 111 – 123

Pandjaitan, Marina. Parengkuan Tommy. Victoria Untu. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. 06(3), 1398-1407

andichairilfurqan. 2012. Contoh Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua
www.andichairilfurqan.wordpress.com (diakses tanggal 12 Mei 2020)

Halim Abdul., 2012. Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat

Mardiasmo, 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : CV. Andi offset

Mahmudi, 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Ratmono Dwi, 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Tanjung Hafiz Abdul, 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Untuk SKPD. Bandung : Alfabeta

Agung, Riski. 2013. Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi Periode Tahun Anggaran 2008-2011. : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sandrawati, Lina. 2008. Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya Periode Tahun Anggaran 2005-2006. : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua